



PEMERINTAH  
KOTA PONTIANAK

---

# RENCANA KERJA TAHUN 2023

---

DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat yang Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023 memuat rencana kerja, indikator kinerja dan pendanaan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang ikut andil menyumbangkan pemikiran, ide, tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnyanya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Semoga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023 ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Pontianak

**ERMA SURYANI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671101 199803 2 004 1 010

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	2
1.3    Maksud dan Tujuan .....	6
1.4    Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU .....</b>	<b>8</b>
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan .....	18
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	34
2.4    Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	36
2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	46
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>47</b>
3.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	47
3.2    Tujuan dan sasaran Renja .....	48
3.3    Program dan Kegiatan .....	54
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL II.1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA .....	12
TABEL II.2	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA .....	19
TABEL II.3	TARGET DAN INDIKATOR KINERJA.....	28
TABEL II.4	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN .....	29
TABEL II.5	PAGU ANGGARAN DAN BELANJA .....	31
TABEL II.6	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	37
TABEL III.1	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	56
TABEL IV.1	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	64

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan yang disusun sebagai penyesuaian terhadap muatan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .

## **2.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5476);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)..
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 nomor 1447)
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9).

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak No 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
17. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 19);
18. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 21);
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
21. Peraturan Walikota Nomor        tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023
22. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 18.1/DISDUKCAPIL/Tahun 2019 tentang Penetapan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024

23. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 04.1/DISDUKCAPIL/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak nomor 01.01/Disdukcapil/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
- b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
- c. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
- d. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. Pendahuluan**

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

#### **BAB II. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **BAB III. Tujuan dan Sasaran**

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.

### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan**

### **BAB V Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Tahun 2022 telah dilaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022. Adapun sasaran yang ditetapkan berikut program dan kegiatan yang dilaksanakan serta capaian kinerjanya dijelaskan berikut ini.

##### **A. Program dan Kegiatan**

Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan :

##### **Program Umum**

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

##### **c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

##### **d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### **Program Pembangunan**

#### **2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
  - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b. Penataan Pendaftaran Penduduk
  - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan.
  - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- c. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
  - Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

#### **3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL**

- a. Pelayanan Pencatatan Sipil
  - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
  - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

- b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
  - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
  - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
- c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
  - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil

#### 4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
  - Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

#### 5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL

- a. Penyusunan Profil Kependudukan
  - Kerjasama Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021**  
**Kota Pontianak**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5	6			7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.12.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												
2.12.01.2.01	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>32</b>	<b>Dokumen</b>		<b>8</b>	<b>Dokumen</b>	<b>8</b>	<b>100,00</b>				
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	20	Dokumen		5	Dokumen	5	100,00				
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA-SKPD yang disusun	4	sub kegiatan		39	sub kegiatan	39	100,00				
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	24	Laporan		6	Laporan	6	100,00				
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	Laporan		3	Laporan	3	100,00				
2.12.01.2.02	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>48</b>	<b>Bulan</b>		<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>				
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00				
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00				
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	16	Laporan		4	Laporan	4	100,00				
2.12.01.2.05	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya</b>	<b>240</b>	<b>ASN</b>		<b>60</b>	<b>ASN</b>	<b>55</b>	<b>91,67</b>				
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	480	Stel		120	Stel	113	94,17				
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	20	Orang		1	Orang	1	100,00				
2.12.01.2.06	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>48</b>	<b>Bulan</b>		<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rebrtra (%)	
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	400	Unit		37768	Unit	37768	100,00			
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
<b>2.12.01.2.07</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>124</b>	<b>Unit</b>		<b>42</b>	<b>Unit</b>	<b>42</b>	<b>100,00</b>			
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1	Unit		1	Unit	1	100,00			
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	120	Unit		41	Unit	41	100,00			
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>48</b>	<b>Bulan</b>		<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>			
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>132</b>	<b>Unit</b>		<b>33</b>	<b>Unit</b>	<b>33</b>	<b>100,00</b>			
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	12	Unit		3	Unit	3	100,00			
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	120	Unit		30	Unit	30	100,00			
<b>02.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga</b>										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rebrtra (%)	
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.02.2.01	<b>PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase pelayanan pendaftaran penduduk</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>94,28</b>	<b>94,28</b>			
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk rentan yang diberikan pelayanan administrasi kependudukan di tempat-tempat tertentu	960	Orang		240	Orang	140	58,33			
		Jumlah penduduk non permanen yang diberikan pelayanan administrasi kependudukan	400	Orang		100	Orang	613	613,00			
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) di tempat-tempat tertentu	16000	Orang		4000	Orang	1140	28,50			
		Jumlah anak yang telah melaksanakan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA)	14000	NIK		3500	NIK	12919	369,11			
		Jumlah pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan	8	Kali		2	Kali	1	50,00			
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan					12280	NIK	8270	67,35			
2.12.02.2.02	<b>PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>			
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko Ktp-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah waktu penyediaan bahan untuk penerbitan dokumen kependudukan	48	Bulan		1	Bulan	1	100,00			
2.12.02.2.03	<b>PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>			
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	192	Kali		6	Kali	6	100,00			
02.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Presentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran</b>										
02.12.03.2.01	<b>PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>			
02.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah data penduduk yang telah dilengkapi dengan data akta pencatatan sipil	28000	NIK		7000	NIK	7000	100,00			
		Jumlah dokumen pencatatan sipil yang dialihmedia menjadi dokumen digital	60000	Dokumen		15000	Dokumen	15000	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah dokumen register akta pencatatan sipil yang dilakukan pemeliharaan rekondisi dan reproduksi	4000	Dokumen		1000	Dokumen	1000	100,00			
02.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		4400	Dokumen		1100	Dokumen	2558	232,55			
<b>2.12.03.2.02</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Presentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>			
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah koordniasi yang dilakukan (kali)	24	Kali		0	Kali	0	#DIV/0!			
2.12.03.2.02.03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah koordniasi yang dilakukan	24	Kali		6	Kali	6	100,00			
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang dihasilkan (paket)	192	Kali		6	Kali	6	100,00			
<b>2.12.03.2.03</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Presentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>			
2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang disinkronisasi dengan data SIAK	4800	Dokumen		1200	Dokumen	1200	100,00			
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat RT dan kelurahan yang mendapatkan bimbingan teknis administrasi kependudukan	1392	Orang		0	Orang	0	#DIV/0!			
<b>02.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH</b>										
2.12.04.2.01	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	100	%		100	%	87,17	87,17			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	29	PD		2	PD	3	150,00			
		Jumlah NIK yang dilakukan update data pendidikannya	116000	NIK		22000	NIK	19177	87,17			
<b>02.12.04.2.03</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>			
02.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jaringan SIAK	144	Kali		36	Kali	36	100,00			
02.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terhadap Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media website	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan data pada sistem intranet	48	Bulan		12	Bulan	12	100,00			
<b>02.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan</b>										
<b>2.12.05.2.01</b>	<b>PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>			
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Agregat Kependudukan	140	Buku		35	Buku	35	100,00			
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah informasi kependudukan yang dijadikan komponen penyusun profil kependudukan	260	Buku		65	Buku	65	100,00			

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan Program operasional dan kegiatan-kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait.

Keberhasilan program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

- Indikator 1** : Persentase Keluarga yang Memiliki KK
- Indikator 2** : Persentase Penduduk yang memiliki KTP
- Indikator 3** : Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA
- Indikator 4** : Persentase penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen
- Indikator 5** : Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran
- Indikator 6** : Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan
- Indikator 7** : Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai
- Indikator 8** : Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status
- Indikator 9** : Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian
- Indikator 10** : Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data

**Indikator 11** : Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan

**Indikator 12** : Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### A. Indikator Kinerja

Target dan realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak**  
**Tahun 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
				(%)	(%)	(%)
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Keluarga yang memiliki KK	95,50	98,02	102,64
			Persentase Penduduk yang memiliki KTP	90,50	99,40	109,83
			Persentase anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA	22,50	33,20	147,56
			Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	97,50	97,56	100,06
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	92,50	96,42	104,24
			Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	52,50	61,00	116,19
			Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai	32,50	74,65	229,69
			Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	32,50	22,80	70,15
			Persentase Penduduk meninggal yang memiliki Akta Kematian	32,50	98,22	302,22
			Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	57,50	66,67	115,95

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
				(%)	(%)	(%)
		Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	Persentase pemanfaatan <i>Database</i> SIAK untuk kepentingan Pembangunan	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

### A. Persentase Keluarga yang memiliki KK

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Persentase Keluarga yang memiliki KK adalah Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan dibagi dengan jumlah kepala keluarga.

Rasio kepemilikan Kartu Keluarga memiliki angka capaian sebesar 102,64%. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Kegiatan ini membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya dokumen kependudukan baik KK maupun KTP elektronik yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan.

### B. Persentase Penduduk yang memiliki KTP

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan

identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP.

Pada tahun 2021, persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki capaian sebesar 109,83 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kota Pontianak berjalan dengan baik. Di samping itu, kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

### **C. Persentase anak usia 01-16 Tahun yang sudah memiliki KIA**

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara

KIA dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama untuk anak yang berumur 0 sampai dengan kurang dari 5 tahun. Sementara itu, jenis yang kedua untuk anak yang berusia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Persentase anak usia 01-16 Tahun yang sudah memiliki KIA dapat dirumuskan sebagai berikut Jumlah Penduduk 0-16 tahun yang memiliki KIA dibagi Jumlah Penduduk 0-16 Tahun.

Pada tahun 2021, persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA tercatat memiliki capaian sebesar 147.56%. Dari target nasional sebesar 22,50%, Dinas Kependudukan Kota Pontianak telah mencapai target nasional.

#### **D. Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen**

Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah tetap, biasanya dilakukan untuk oleh mahasiswa yang sedang belajar di tempat tertentu, dan penduduk yang bekerja.

Setiap penduduk non permanen wajib memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen yang dulu disebut dengan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan yang bersangkutan di wilayah setempat.

Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, kecuali untuk pelajar dan mahasiswa dapat diperpanjang sampai selesai pendidikan dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi. Setiap penduduk non permanen wajib melaporkan diri dan atau penampung penduduk non permanen wajib melaporkan penduduk yang ditampung dalam waktu 2 x 24 jam sejak kepindahannya kepada kelurahan setempat melalui RT/RW di wilayah tempat tinggalnya.

Indikator persentase penduduk non permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen di rumuskan yaitu

jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen dibagi jumlah pemohon penduduk non permanen. Untuk tahun 2021, realisasi pencapaiannya adalah 97,56%.

#### **E. Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran**

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan. Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah penduduk usia 0-18 tahun

Tahun 2021, persentase penduduk 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran yang mencapai 96,42%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pembuatan akta kelahiran, baik yang dilakukan melalui *MoU* dengan klinik-klinik bersalin dan rumah sakit, maupun pelayanan rutin yang dilakukan di kelurahan-kelurahan se-Kota Pontianak berjalan baik. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh pengelolaan *website* dinas yang berjalan baik sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

## **F. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan**

Sebuah pernikahan merupakan hal yang harus dilegalkan secara Negara agar pasangan suami istri memiliki perlindungan dan pengakuan tentang status pernikahan, hak dan kewajiban serta anak-anak yang akan dilahirkan kelak.

Salah satu dokumen penting yang perlu di miliki oleh pasangan suami dan istri yang telah sah menikah secara agama dan Negara adalah akta nikah. Dalam akta nikah dijelaskan tentang terjadinya perkawinan antara suami dan istri dan hal tersebut diakui oleh Negara setelah sah secara agama.

Akta nikah merupakan dokumen penting yang menjadi bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan. Akta Nikah memiliki kekuatan pembuktian formal karena didalamnya telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatatn secara benar oleh Negara. Selain itu, akta nikah juga memiliki kekuatan pembuktian material yang memberikan kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta tersebut benar secara matetial dan benar-benar terjadi.

Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan di rumuskan yaitu jumlah penduduk yangn memiliki Akta Perkawinan (penduduk berstatus kawin tercatat) dibagi jumlah penduduk berstatus kawin. Untuk tahun 2021, Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan mencapai 61,00%.

## **G. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Cerai**

Akta Cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta Cerai bisa diterbitkan jika gugatan/permohonan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pencatatan perceraian dilakukan dengan cara yaitu pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan.

Persentase penduduk yang memiliki Akta Cerai dirumuskan yaitu jumlah penduduk yang memiliki Akta perceraian (penduduk berstatus cerai hidup tercatat) dibagi jumlah penduduk berstatus cerai hidup tercatat dan dan tidak tercatat, Pada tahun 2021 untuk realisasi kinerja adalah 74.65% dari target sebesar 32.50%.

#### **H. Persentase anak yang memiliki Dokumen Perubahan Status**

Pengakuan anak merupakan pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengakuan anak akan menimbulkan hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ayah kandung, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata antar ayah kandung dengan ibu kandung.

Sedangkan pengesahan anak merupakan pengesahan status hukum seorang anak yang lahir, diluar ikatan perkawinan yang sah, diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.

Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status dirumuskan yaitu jumlah anak yang mengalami perubahan status dibagi jumlah anak yang berstatus anak seorang ibu. Untuk Tahun 2021 capaiannya adalah sebesar 70,15%.

#### **I. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian**

Kutipan akta kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan peristiwa kematian. Penerbitan kutipan akta kematian adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa kematian dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerbitkan kutipan akta kematian berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

Persentase penduduk yang meninggal yang memiliki akta kematian adalah jumlah penduduk yang memiliki akta kematian dibagi jumlah pelaporan kematian.

Tahun 2021, Persentase penduduk yang meninggal yang memiliki akta kematian terealisasi sebesar 98.22%. Serupa dengan pelayanan kutipan akta kelahiran, pelayanan jemput bola yang dilakukan dalam rangka percepatan kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak membuahkan hasil yang memuaskan.

#### **J. Persentase Jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data**

Pemanfaatan data kependudukan merupakan aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan dan atau penegakan hukum.

Proses pemberian ijin oleh Dirjen Dukcapil diatur di dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan lembaga pengguna. Ijin pemanfaatan data dan akses data tingkat kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota. Ijin sebagaimana dimaksud sebagai syarat pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan lembaga pengguna.

Persentase jumlah instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data di rumuskan yaitu jumlah instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data dibagi jumlah instansi pelayan publik di Kota Pontianak. Untuk Tahun 2021 telah dilakukan sebanyak 21 Perangkat Daerah yang telah melakukan PKS dan artinya jumlah capainya adalah sebesar 115.95%

#### **K. Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk Kepentingan Pembangunan**

Tingkat keakurasian data dan informasi khususnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mampu dilaksanakan karena

menyangkut hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundangan khususnya dari kependudukan diukur dengan rasio data kependudukan yang akuran dibagi keseluruhan data penduduk. Data penduduk yang akuran merupakan selisih dari data penduduk dikurangi data ganda dan data anomali lainnya.

Berdasarkan Pasal 58 ayat 4 UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Data Kependudukan digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembanguan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketersediaan *Database* kependudukan berskala kota dan dapat di rumuskan yaitu ketersediaan *Database* SIAK untuk pembangunan dibagi jenis pelayanan sesuai peraturan. Untuk tahun 2021 telah dicapai.

Untuk target indikator pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Target dan Indikator Kinerja**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak**  
**Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK	96.50
2	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	91.50
3	Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA	27.50
4	Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	98.50
5	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	93.50
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	57.50
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai	37.50
8	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	37.50
9	Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian	37.50
10	Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	62.50

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
11	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan	100
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sangat Baik

Analisis kinerja pelayanan dari tahun (n-2) , tahun(n-1), tahun n, tahun (n+1) dapat disajikan sebagai berikut

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak**

N O	Indikator	SPM/stand ar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK			95,50	96,00	96,50	97,00			96,50	97,00	
2	Persentase Penduduk yang memiliki KTP		Perekaman KTP Elektronik	90,50	91,00	91,50	92,00			91,50	92,00	
3	Persentase anak usia 0-16 tahun yang sudah memiliki KIA		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	22,50	25,00	27,50	30,00			27,50	30,00	
4	Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen			97,50	98,00	98,50	99,00			98,50	99,00	
5	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran		Kepemilikan Akta Kelahiran	92,50	93,00	93,50	94,00			93,50	94,00	
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan		Penerbitan Akta Perkawinan	52,50	55,00	57,50	60,00			57,50	60,00	
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai		Penerbitan Akta Perceraian	32,50	35,00	37,50	40,00			37,50	40,00	
8	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status			32,50	35,00	37,50	40,00			37,50	40,00	
9	Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian		Penerbitan Akta Kematian	32,50	35,00	37,50	40,00			37,50	40,00	
10	Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	57,50	60,00	62,50	65,00			62,50	65,00	
11	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan		Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	

NO	Indikator	SPM/stand ar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik			Sangat Baik	Sangat Baik	

## B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pontianak Tahun 2021.

APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2021 sebesar Rp.12.325.003.694,- untuk Belanja terdiri dari :

### Belanja Tidak Langsung

Gaji dan Tunjangan Rp. 6.942.708.326,-

### Belanja Langsung

- Belanja Pegawai Rp. 378.935.000,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.854.671.206,-

- Belanja Modal Rp 1.148.689.162,-

Rp. 5.382.295.368,-

**Total Belanja Rp. 12.325.003.694,-**

Adapun rincian Belanja Tahun 2021 per Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Pagu Anggaran dan Belanja**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak**  
**Tahun Anggaran 2021**  
**(dalam rupiah)**

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Perubahan)	Total Realisasi	%
I.	2.12.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.584.783	152.633.100	99,38
1	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.659.045	8.657.800	99,99
2	2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.976.338	4.975.900	99,99
3	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.199.500	17.199.500	100,00
4	2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.749.900	121.799.900	99,23

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Perubahan)	Total Realisasi	%
<b>II.</b>	<b>2.12.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.278.743.226</b>	<b>6.911.318.964</b>	<b>94,95</b>
5	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.942.708.326	6.576.794.064	94,73
6	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	333.585.000	332.225.000	99,59
7	2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.449.900	2.299.900	93,88
<b>III.</b>	<b>2.12.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>122.079.937</b>	<b>120.060.000</b>	<b>98,35</b>
8	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	86.430.000	86.430.000	100,00
9	2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	5.000.000	100,00
10	2.12.01.2.05.09	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	30.649.937	28.630.000	93,41
35	2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	#DIV/0!
<b>Ik</b>	<b>2.12.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.574.285.813</b>	<b>1.523.579.196</b>	<b>96,78</b>
10	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.888	9.997.800	99,98
11	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.395.940.091	1.349.107.520	96,65
12	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.075.000	36.896.000	99,52
13	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.774	29.827.500	99,43
14	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.720.000	9.665.000	99,43
15	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.551.060	88.085.376	96,21
<b>V.</b>	<b>2.12.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.167.149.262</b>	<b>1.104.817.274</b>	<b>94,66</b>
16	2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	713.200.100	663.568.694	93,04
17	2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	453.949.162	441.248.580	97,20
<b>VI.</b>	<b>2.12.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.300.452.102</b>	<b>1.283.090.321</b>	<b>98,66</b>
18	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.901.980	27.061.650	67,82
19	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.999.000	23.380.995	93,53
20	2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	#DIV/0!
21	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.235.551.122	1.232.647.676	99,77
<b>VII.</b>	<b>2.12.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>64.993.600</b>	<b>64.979.700</b>	<b>99,98</b>
22	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.313.600	40.308.200	99,99
23	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.680.000	24.671.500	99,97

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Perubahan)	Total Realisasi	%
<b>VIII.</b>	<b>2.12.02.2.01.</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>73.149.000</b>	<b>70.758.000</b>	<b>96,73</b>
24	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	42.449.500	42.449.500	100,00
25	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	28.699.500	26.309.500	91,67
	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.000.000	1.999.000	99,95
<b>IX.</b>	<b>2.12.02.2.02.</b>	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>6.607.000</b>	<b>6.607.000</b>	<b>100,00</b>
26	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	6.607.000	6.607.000	100,00
<b>X.</b>	<b>2.12.02.2.03.</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>38.500.000</b>	<b>38.500.000</b>	<b>100,00</b>
27	2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	38.500.000	38.500.000	100,00
28	2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	-	-	#DIV/0!
<b>XI.</b>	<b>2.12.03.2.01.</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>215.445.518</b>	<b>214.248.400</b>	<b>99,44</b>
29	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.650.618	25.650.300	100,00
30	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	189.794.900	188.598.100	99,37
<b>XII.</b>	<b>2.12.03.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>40.400.000</b>	<b>37.899.800</b>	<b>93,81</b>
31	2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	-	-	#DIV/0!
32	2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	37.900.000	35.400.000	93,40
33	2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	2.500.000	2.499.800	99,99
<b>XIII.</b>	<b>2.12.03.2.03.</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>58.750.000</b>	<b>58.750.000</b>	<b>100,00</b>
34	2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	58.750.000	58.750.000	100,00

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Perubahan)	Total Realisasi	%
	2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	-	-	#DIV/0!
<b>XIV.</b>	<b>2.12.04.2.01.</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>103.885.480</b>	<b>103.725.000</b>	<b>99,85</b>
36	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	103.885.480	103.725.000	99,85
<b>XV.</b>	<b>2.12.04.2.03.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>113.555.040</b>	<b>108.255.369</b>	<b>95,33</b>
37	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	81.404.940	77.715.000	95,47
38	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	#DIV/0!
39	2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	32.150.100	30.540.369	94,99
<b>XVI.</b>	<b>2.12.05.2.01.</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>13.422.933</b>	<b>12.422.933</b>	<b>92,55</b>
40	2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2.853.783	2.853.783	100,00
41	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	10.569.150	9.569.150	90,54
		<b>JUMLAH</b>	<b>12.325.003.694</b>	<b>11.811.645.057</b>	<b>95,83</b>

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 2.3.1 Permasalahan Bidang Pelayanan Kependudukan

1. Belum semua penduduk memiliki Kartu Keluarga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KK SIAK).
2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pelayanan kependudukan.
3. Masih belum semua penduduk wajib KTP yang melakukan perekaman KTP-el.
4. Belum semua penduduk wajib KTP yang sudah merekam KTP-el menerima KTP-el.
5. Kurangnya sarana dan petugas dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

### 2.3.2 Permasalahan Bidang Pencatatan Sipil

1. Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen pencatatan sipil.

2. Belum semua penduduk melaporkan peristiwa kelahiran untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta kelahiran
3. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pelayanan pencatatan sipil.
4. Masih belum sepenuhnya pengarsipan dan pemeliharaan dokumen pencatatan sipil.
5. Masih banyak peristiwa perkawinan yang belum dilaporkan untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta perkawinan.

### 2.3.3 Permasalahan Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan

1. Tenaga/staf yang menangani TI masih kurang jika dibandingkan dengan tanggung jawab untuk menangani TI di internal, kecamatan, dan lintas Perangkat Daerah.
2. Kaderisasi Administrator Database belum berjalan dan memperhatikan tantangan administrasi kependudukan maka perlu pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk Administrator Database yang baru.
3. Tenaga/staf masih terfokus ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sehingga untuk menangani pengembangan sistem yang lain tidak diperhatikan. Dampak lanjutannya, masing-masing staf dari masing-masing seksi tidak memahami tupoksinya secara utuh.
4. Sulit untuk melakukan eksplorasi lebih dalam untuk pengembangan di Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dan di Seksi Pengolahan dan Penyajian Data, karena staf lebih banyak difungsikan untuk melayani rutinitas layanan kepada warga.
5. Jaringan komunikasi data masih perlu dioptimalkan dalam topologi dan penataannya, baik itu dalam internal Dukcapil maupun dari Dukcapil ke luar.
6. Setiap ada aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri yang harus dilaksanakan di Daerah selalu menimbulkan kendala teknis, yang menyebabkan keharusan untuk

mengimplementasikan hal tersebut tidak dapat terealisasi tepat waktu.

7. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kondisi perangkat keras/jaringan harus selalu menyesuaikan dengan hal tersebut, agar dapat optimal dalam melakukan pelayanan.
8. Tidak ada pengembangan dalam pengolahan data dan hanya terfokus ke penyusunan profil perkembangan kependudukan verifikasi anomali data. Sementara data hal lain belum dapat dilakukan seperti analisis dampak kependudukan, penyusunan indikator kependudukan, dan penyusunan tipologi kependudukan.
9. Perlunya pengembangan kapasitas pembelajaran lebih lanjut dalam menganalisis permasalahan pengolahan data.
10. Masih ditemukannya anomali data kependudukan yang membutuhkan penyelesaian secara terstruktur dan efektif.
11. Masih perlunya pemahaman pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga/Perangkat Daerah.
12. Masih perlunya peningkatan kapasitas dan komunikasi ke Pusat terhadap pemanfaatan data.
13. Kemitraan strategis di tingkat daerah masih perlu dioptimalkan

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Program-program yang mendukung Rencana Kerja 2023 dalam pencapaian target indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kota Pontianak**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	10.241.388.680,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pontianak	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	10.241.388.680,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	29.644.390,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	29.644.390,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	7.249.790,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	7.249.790,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.194.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.194.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	17.599.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	17.599.800,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.600.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.600.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	57 ASN	7.119.538.800,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	57 ASN	7.119.538.800,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bulan	6.830.900.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bulan	6.830.900.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	285.840.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	285.840.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	4 laporan	2.798.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	4 laporan	2.798.800,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	57 ASN	55.420.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	57 ASN	55.420.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 paket	36.420.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 paket	36.420.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
-1	-2	-4	-5	-6		-7	-8	-9	-10	-11		-12
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	10.000.000,00		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	10.000.000,00		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	400 orang	9.000.000,00		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Pontianak	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	400 orang	9.000.000,00		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.188.040.790,00</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.188.040.790,00</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	10.000.000,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	10.000.000,00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	1.056.673.500,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	1.056.673.500,00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	33.100.000,00		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	33.100.000,00		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	22.044.600,00		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	22.044.600,00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	66.222.690,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	66.222.690,00		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>30 Unit</b>	<b>274.343.900,00</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>30 Unit</b>	<b>274.343.900,00</b>		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 unit	274.343.900,00		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pontianak	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 unit	274.343.900,00		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.461.518.800,00</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.461.518.800,00</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.000.000,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.000.000,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.000.000,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.000.000,00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.401.518.800,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.401.518.800,00		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>33 Unit</b>	<b>112.882.000,00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>33 Unit</b>	<b>112.882.000,00</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	3 unit	78.282.000,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	3 unit	78.282.000,00		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
-1	-2	-4	-5	-6		-7	-8	-9	-10		-11	-12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30	unit	34.600.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pontianak	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30	unit	34.600.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Pontianak					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pontianak					
2	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	88,5	%	79.219.700,00	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Pontianak	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	88,5	%	79.219.700,00	
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	80,5	%				Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	80,5	%		
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	85,5	%				Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	85,5	%		
		Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	97,5	%				Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	97,5	%		
		Persentase penerbitan dokumen KTP EI, KK, KIA, pada pelayanan keliling	100	%				Persentase penerbitan dokumen KTP EI, KK, KIA, pada pelayanan keliling	100	%		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	%	42.019.700,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pontianak	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	%	42.019.700,00	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	660	Dokumen	17.219.900,00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	660	Dokumen	17.219.900,00	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	80	Laporan	21.799.800,00	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	80	Laporan	21.799.800,00	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Laporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Laporan Peristiwa Kependudukan	12000	Dokumen	3.000.000,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Laporan Peristiwa Kependudukan	Pontianak	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Laporan Peristiwa Kependudukan	12000	Dokumen	3.000.000,00	
	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>37.200.000,00</b>	
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	80	Dokumen	37.200.000,00	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	80	Dokumen	37.200.000,00	
3	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan</b>	<b>47,50</b>	<b>%</b>	<b>101.984.400,00</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan</b>	<b>47,50</b>	<b>%</b>	<b>101.984.400,00</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
-1	-2	-4	-5	-6		-7	-8	-9	-10	-11		-12
		Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	32,50	%				Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	32,50	%		
		Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	32,50	%				Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	32,50	%		
		Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	32,50	%				Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	32,50	%		
		Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	100,00	%				Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling	100,00	%		
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>36.874.600,00</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>36.874.600,00</b>	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	10000	Dokumen	26.349.700,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	10000	Dokumen	26.349.700,00	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12	Layanan	10.524.900,00	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12	Layanan	10.524.900,00	
	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>45.929.900,00</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>45.929.900,00</b>	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1	Laporan	8.729.900,00	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1	Laporan	8.729.900,00	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	29	Laporan	37.200.000,00	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	29	Laporan	37.200.000,00	
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>19.179.900,00</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Pontianak</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>19.179.900,00</b>	
	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	2	Laporan	19.179.900,00	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Pontianak	Jumlah Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	2	Laporan	19.179.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	82,5 %	206.634.020,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pontianak	Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	82,5 %	206.634.020,00	
		Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	1 %				Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	1 %		
		Persentase penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pelayanan keliling	%				Persentase penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pelayanan keliling	%		
		Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	%				Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	%		
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %	83.635.280,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pontianak	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %	83.635.280,00	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	83.635.280,00	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pontianak	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	83.635.280,00	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	122.998.740,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	122.998.740,00	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	81.404.940,00	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	81.404.940,00	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Dokumen	41.593.800,00	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Dokumen	41.593.800,00	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	19.925.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Pontianak	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	19.925.000,00	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	100 %	19.925.000,00	Penyusunan Profil Kependudukan	Pontianak	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	100 %	19.925.000,00	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.000.000,00	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Pontianak	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.000.000,00	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 Dokumen	16.925.000,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Pontianak	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 Dokumen	16.925.000,00	
				10.649.151.800,00					10.649.151.800,00	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil untuk masyarakat di wujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk elektronik, penerbitan Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), penerbitan akte kelahiran dan akte kematian serta semua pengurusan dokumen lainnya terkait kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan KTP elektronik, KK, akte kelahiran, akte kematian serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan terus di tingkatkan dengan menyiapkan unit mobil keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyerderhanaan prosedur, pelayanan ditempat-tempat tertentu misalnya *Car free Day* serta kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik dengan diberlakukannya pendaftaran pengurusan secara *online*, Sehingga dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak langsung mengakomodir usulan program dan kegiatan yang secara fisik di usulkan oleh masyarakat, yang dilakukan adalah selalu meningkatkan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu pelayanan prima.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dilaksanakan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan. Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta berbagai aturan di bawahnya maka penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2022 merupakan kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya. Kebijakan Nasional yang didukung DPR telah memprogramkan 5 (lima) program strategis nasional yaitu :

1. Pemutakhiran data kependudukan;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. Penerapan KTP Elektronik
4. Bidang Pencatatan Sipil “Semua anak Indonesia tercatat kelahirannya”;
5. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sinergi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Kota Pontianak yang mempunyai Visi pada RPJMD : *“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat* dan Misi 3: *“Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas”*.

Pernyataan visi dapat diuraikan sebagai berikut:

■ **Berwawasan Lingkungan**

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

■ **Cerdas**

Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup Perangkat Daerah dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.

■ **Bermartabat**

Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

Beberapa Kebijakan Nasional :

a) **SIAK TERPUSAT**

SIAK Terpusat merupakan sistem digitalisasi yang digunakan agar pelayanan kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) dapat terkoneksi daring secara nasional. Sistem terpusat ini lebih efisien dari segi sistem keamanan siber dan dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dengan lebih cepat.

Isu digitalisasi pada sistem dukcapil ini terus bertransformasi. Dimulai sejak 1995 dengan nama Sistem Manajemen Informasi Kependudukan (SIMDUK), lalu berubah pada 2000 menjadi Sistem Informasi Registrasi Penduduk (SIREP), dan terakhir pada 2022 berubah nomenklatur menjadi SIAK Terpusat.

Pemerintah Kota Pontianak turut menjadi daerah yang menyelenggarakan SIAK Terpusat. Dengan tujuan memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi demi mewujudkan pelayanan kependudukan yang lebih cepat dan berkualitas. Diantara 514 dinas Dukcapil yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, Kota Pontianak salah satu yang telah bermigrasi pada SIAK terpusat dengan baik, tanpa menghentikan pelayanan rutin kepada masyarakat.

Pada Tahun 2022, Ditjen Dukcapil Kemendagri mempercepat proses migrasi data ini dari SIAK terdistribusi menuju SIAK terpusat tersebut. Konsentrasi SIAK terpusat ini salah satunya menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan jadwal bagi Kemendagri untuk menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada 14 Oktober 2022 atau 16 bulan sebelum pencoblosan. Hal ini sebagai dukungan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai tahun ini.

#### **b) IDENTITAS DIGITAL (DIGITAL ID)**

Digital-ID merupakan petunjuk identitas berbentuk digital yang diberikan kepada seseorang setelah diidentifikasi dan diverifikasi secara fisik oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Isu Digital ID ini muncul dari hasil kajian aktual Penerapan Digital-ID dalam Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri pada 2021. Isu ini mendapat antusiasme masyarakat. Meski masih ada problem perlunya menyiapkan serangkaian upaya peningkatan literasi digital bagi masyarakat. Meningkatkan literasi digital, terutama untuk masyarakat perdesaan dan 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan lembaga non-profit.

Pemerintah Kota Pontianak siap turut melakukan sosialisasi dan diseminasi terkait Digital ID. Di daerah berpeluang membuat grup-grup fasilitator untuk menjangkau masyarakat di tingkat bawah. Bersamaan hal tersebut, Kemendagri mulai memetakan peluang, potensi, dan beragam hal yang perlu diperhatikan untuk penerapan digital-ID.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### A. Misi

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung Misi 3 yaitu **Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas.**

#### B. Tujuan dan Sasaran

##### 1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan

misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) (*key performance indicator*) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

**Misi** :“**Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas**”

**Tujuan** :“**Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Masyarakat**”

## 2. Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Realistic*) dan tepat waktu (*Time Bound*). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

- a. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan
- b. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
- c. Meningkatnya Kerjasama Disdukcapil dengan Instansi terkait
- d. Meningkatnya Ketersediaan *Database* Kependudukan berskala Kota
- e. Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Optimal

Untuk menilai keberhasilan pencapaiannya sasaran ini diukur dengan indikator-indikator sebagai tolok ukurnya, yaitu:

- Persentase Keluarga yang memiliki KK
- Persentase Penduduk yang memiliki KTP
- Persentase anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki KIA
- Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non Permanen
- Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran
- Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan
- Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai
- Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status
- Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian
- Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data
- Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan
- Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### **C. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini:

#### **1. Strategi dan Kebijakan**

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menetapkan kebijakan dan program untuk tahun 2020-2024. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan

keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Adapun strategi dan kebijakan yang diterapkan sebagai langkah strategis selama periode 2020-2024 adalah:

### **Tujuan**

Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Masyarakat

### **Sasaran**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### **Strategi**

1. Meningkatkan Kualitas Penataan Administrasi Pendaftaran Kependudukan
2. Meningkatkan Kualitas Penataan Administrasi Pencatatan Sipil
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

### **Kebijakan**

1. Melakukan pelayanan pembuatan KTP elektronik ditempat-tempat tertentu
2. Melakukan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan (kali)

3. Melaksanakan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA) (NIK)
4. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk rentan
5. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk non permanen
6. Melakukan penerbitan Akta Kelahiran di tempat-tempat tertentu
7. Melakukan Pendataan data penduduk yang telah dilengkapi dengan data akta pencatatan sipil (NIK)
8. Melakukan digitalisasi dokumen pencatatan sipil yang dialihmedia menjadi dokumen digital
9. Melakukan sinkronisasi peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian dengan data SIAK
10. Melakukan pemeliharaan rekondisi dan reproduksi dokumen register akta pencatatan sipil (dokumen)
11. Melakukan bimbingan teknis administrasi pencatatan sipil terhadap perangkat RT dan Kelurahan
12. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras maupun perangkat lunak Data Warehouse
13. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media website
14. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jaringan SIAK
15. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan data pada sistem intranet serta penyampain informasi melalui SMS gateway
16. Melakukan kegiatan verifikasi dan pembersihan database kependudukan dari data ganda dan anomali lainnya
17. Menyusun profil kependudukan berdasarkan informasi kependudukan
18. Melakukan pembaharuan data kependudukan dari kegiatan kemitraan dengan pihak lain
19. Menyusun Buku Data Agregat Kependudukan

### **3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023**

Program/Kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program prioritas, indikator kinerja program/kegiatan, tahun indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap pada matrik rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2022 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Prioritas pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2022 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- 2. Program Pendaftaran Penduduk**
- 3. Program Pencatatan Sipil**
- 4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**
- 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

Program-program ini merupakan pedoman bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Rumusan rencana program dan kegiatan dan perkiraan maju dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**  
**Kota Pontianak**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2																		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	12										10.649.151.800							24.650.447.120
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
2	12	01									10.241.388.680							10.573.836.250
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
2	12	01	02.01								29.644.390							17.153.950
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	5 Dokumen	15 dokumen	7.249.790	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	6.599.450
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	2 Dokumen	15 dokumen	1.194.800	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	1.314.500
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	5 Laporan	15 dokumen	17.599.800	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	5.280.000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		100 %	3 Laporan	15 dokumen	3.600.000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	3.960.000
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.119.538.800					8.267.515.420

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	55 Orang/bulan	12	6.830.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	7.746.850.000
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	12 Dokumen	12 bulan	285.840.000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	517.586.520
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	4 Laporan	12 bulan	2.798.800	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	3.078.900
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>55.420.000</b>					<b>137.316.000</b>
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		100 %	55 Paket	57 ASN	36.420.000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	85.316.000
2	12	01	02.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		100 %	2 Orang	57 ASN	10.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	33.000.000
2	12	01	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		100 %	400 Orang	57 ASN	9.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	19.000.000
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>1.188.040.790</b>					<b>491.744.000</b>
2	12	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		100 %	2 Paket	12 bulan	10.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	11.000.000
2	12	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		100 %	2 Paket	12 bulan	1.056.673.500	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	125.686.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	12	01	02.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		100 %	12 Paket	12 bulan	33.100.000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	50.490.000	
2	12	01	02.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		100 %	1 Paket	12 bulan	22.044.600	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	33.000.000	
2	12	01	02.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		100 %	12 Laporan	12 bulan	66.222.690	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	271.568.000	
2	12	01	02.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>274.343.900</b>							<b>877.408.600</b>
2	12	01	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	30 Unit	30 unit	274.343.900	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	877.408.600	
2	12	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>1.461.518.800</b>							<b>696.082.080</b>
2	12	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 Laporan	12 bulan	28.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	18.150.000	
2	12	01	02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 Laporan	12 bulan	32.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	35.200.000	
2	12	01	02.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 Laporan	12 bulan	1.401.518.800	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	642.732.080	
2	12	01	02.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>112.882.000</b>							<b>86.616.200</b>
2	12	01	2.09 02	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100 %	3 Unit	33 unit	78.282.000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	48.556.200	
2	12	01	2.09 06	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100 %	30 Unit	33 unit	34.600.000	Pendapatan Bagi Hasil		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	38.060.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	12	02			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>									381,570,900				
2	12	02	2.01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>									119,070,900				
2	12	02	02.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk		98.50 % 86.50 % 81.50 % 98.50 %	660 Dokumen	100 %	17.219.900	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	98.50 % 86.50 % 81.50 % 98.50 %	60,829,450
2	12	02	02.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk		98.50 % 86.50 % 81.50 % 98.50 %	12000 Doku	100%	3.000.000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	98.50 % 86.50 % 81.50 % 98.50 %	3,000,000
2	12	02	02.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk		98.50 % 86.50 % 81.50 % 98.50 %	80 Laporan	100 %	21.799.800	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	98.50 % 86.50 % 81.50 % 98.50 %	55,241,450
2	12	02	02.03		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>										37.200.000			262,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	12	02	02.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga Persentase Penyelesaian Peristiwa Penting Pendaftaran Penduduk Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA Persentase Penyelesaian Pendaftaran Penduduk Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		89.50 % 86.50 % 81.50 % 98.50 %	80 Dokumen	100 %	37.200.000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga Persentase Penyelesaian Pendaftaran KIA Persentase Penyelesaian Pendaftaran KTP Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	89.50 % 86.50 % 81.50 % 98.50 %	262.500,000	
2	12	03			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>								<b>101,984,400</b>						484,362,390
2	12	03	2,01		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>									<b>36,874,600</b>					<b>281,462,390</b>
2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	umlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil		37,50 % 47,50 % 37,50 % 57,50 % 37,50 %	10000 Dokumen	100 %	26,349,700	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	37,50 % 47,50 % 37,50 % 57,50 % 37,50 %	32.230,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	03	2,01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil		37,50 % 47,50 % 37,50 % 57,50 % 37,50 %	12 Layanan	100 %	10,524,900	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	37,50 % 47,50 % 37,50 % 57,50 % 37,50 %	249,232,390
2	12	03	2,02		<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>							<b>45,929,900</b>			<b>123,040,000</b>			
2	12	03	2,02	03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akte Kematian tepat waktu pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		37,50 % 47,50 % 37,50 % 37,50 %	1 Laporan	100%	8,729,900	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akte Kelahiran tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akte Kematian tepat waktu pelaporan	37,50 % 47,50 % 37,50 % 57,50 % 37,50 %	46,640,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja							Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target						
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		37.50 % 47.50 % 57.50 % 37.50 %	29 Laporan	100%	37,200,000	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akte Kelahiran tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akte Kematian tepat waktu pelaporan	37.50 % 47.50 % 57.50 % 37.50 % 37.50 %	76,400,000
2	12	03	02.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								19.179.900				79.860.000		
2	12	03	02.03	03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		37.50 % 47.50 % 37.50 % 57.50 % 37.50 %	2 Laporan	100 %	19.179.900	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akte Kelahiran tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang menikah menerima Akte Perkawinan tepat waktu pelaporan Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akte Kematian tepat waktu pelaporan	37.50 % 47.50 % 37.50 % 57.50 % 37.50 %	79.860.000
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								206.634.020				299.023.560	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
2	12	04	02.01		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>						<b>83.635.280</b>				<b>126.950.780</b>		
2	12	04	02.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		1 % 82.50 %	2 Dokumen	100 %	83.635.280	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	1 % 82.50 %	126.950.780
2	12	04	02.03		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>						<b>122.998.740</b>				<b>172.072.780</b>		
2	12	04	02.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1 % 82.50 %	4 Laporan	100 %	81.404.940	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	1 % 82.50 %	110.209.000
2	12	04	02.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1 % 82.50 %	2 Laporan	100 %	41.593.800	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	1 % 82.50 %	61.863.780
2	12	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>						<b>19.925.000</b>				<b>21.092.500</b>		
2	12	05	02.01		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>						<b>19.925.000</b>				<b>21.092.500</b>		
2	12	05	02.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan		100 %	1 Dokumen	100 %	3.000.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	3.190.000
2	12	05	02.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan		100 %	1 Dokumen	100 %	16.925.000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	17.902.500
										<b>TOTAL</b>			<b>10.649.151.800</b>				<b>24.650.447.120</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sesuai dengan berbagai isu-isu penting yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dalam menopang misi dari pemerintah daerah yaitu *Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas* dengan menciptakan pemerataan pelayanan dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta aktualisasi kondisi pelayanan saat ini dikaitkan dengan kondisi masyarakat kota Pontianak dalam bidang administrasi kependudukan.

Untuk menjawab dan mengatasi tantangan pelayanan administrasi kependudukan maka program dan kegiatan yang dirumuskan dan akan dilaksanakan ditahun 2023, berikut kami sajikan tabel IV.1 terkait dengan nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja dalam rancangan akhir renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	12	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan</b>	Pontianak	100	%	10.241.388.680,00		
2	12	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Pontianak	15	dokumen	29.644.390,00		
2	12	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Pontianak	5	dokumen	7.249.790,00	APBD	
2	12	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	2	dokumen	1.194.800,00	APBD	
2	12	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	5	laporan	17.599.800,00	APBD	
2	12	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	3	laporan	3.600.000,00	APBD	
2	12	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	Pontianak	12	bulan	7.119.538.800,00		
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pontianak	55	Orang/Bulan	6.830.900.000,00	Dana Transfer Umum, PAD	
2	12	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	12	Dokumen	285.840.000,00	APBD	
2	12	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pontianak	4	Laporan	2.798.800,00	APBD	
2	12	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya</b>	Pontianak	57	ASN	55.420.000,00		
2	12	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pontianak	55	paket	36.420.000,00	APBD	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	12	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pontianak	2	orang	10.000.000,00	APBD	
2	12	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	400	orang	9.000.000,00		
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>1.188.040.790,00</b>		
2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pontianak	2	paket	10.000.000,00	APBD	
2	12	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pontianak	2	paket	1.056.673.500,00	APBD	
2	12	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pontianak	12	paket	33.100.000,00	APBD	
2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pontianak	1	paket	22.044.600,00	APBD	
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pontianak	12	laporan	66.222.690,00	APBD	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>30</b>	<b>unit</b>	<b>274.343.900,00</b>		
2	12	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pontianak	30	unit	274.343.900,00	APBD	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Pontianak</b>	<b>12</b>	<b>bulan</b>	<b>1.461.518.800,00</b>		
2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	12	laporan	28.000.000,00	APBD	
2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pontianak	12	laporan	32.000.000,00	APBD	
2	12	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pontianak	12	laporan	1.401.518.800,00	APBD	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>Pontianak</b>	<b>33</b>	<b>unit</b>	<b>112.882.000,00</b>		
2	12	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pontianak	3	unit	78.282.000,00	APBD	
2	12	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pontianak	30	unit	34.600.000,00	APBD	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
2	12	02			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga</b>	<b>Pontianak</b>	<b>89,5</b>	<b>%</b>	<b>79.219.700,00</b>		
						<b>Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP</b>		<b>81,5</b>	<b>%</b>			
						<b>Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA</b>		<b>86,5</b>	<b>%</b>			
						<b>Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen</b>		<b>98,5</b>	<b>%</b>			
						<b>Persentase penerbitan dokumen KTP EI, KK, KIA, pada pelayanan keliling</b>		<b>100</b>	<b>%</b>			
2	12	02	2,01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Pontianak</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>42.019.700,00</b>		
2	12	02	2,01	'01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pontianak	660	dokumen	17.219.900,00	APBD	
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pontianak	80	laporan	21.799.800,00	APBD	
2	12	02	2,01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pontianak	12000	dokumen	3.000.000,00	APBD	
2	12	02	2,03		<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Pontianak</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>37.200.000,00</b>		
2	12	02	2,03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pontianak	80	dokumen	37.200.000,00	APBD	
2	12	03			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan</b>	<b>Pontianak</b>	<b>47,5</b>	<b>%</b>	<b>101.984.400,00</b>		
						<b>Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan</b>		<b>32,5</b>	<b>%</b>			
						<b>Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan</b>		<b>32,5</b>	<b>%</b>			
						<b>Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan</b>		<b>32,5</b>	<b>%</b>			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
						<b>Persentase penerbitan dokumen Akte Kelahiran dan Akte Kematian pada pelayanan keliling</b>		<b>100</b>	<b>%</b>			
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>03</b>	<b>2,01</b>		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Pontianak</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>36.874.600,00</b>		
2	12	03	2,01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pontianak	10.000	dokumen	26.349.700,00	APBD	
2	12	3	2,01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Pontianak	12	layanan	10.524.900,00	APBD	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>03</b>	<b>2,02</b>		<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Pontianak</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>45.929.900,00</b>		
2	12	03	2,02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Pontianak	1	laporan'	8.729.900,00	APBD	
2	12	03	2,02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Pontianak	29	laporan'	37.200.000,00	APBD	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>03</b>	<b>2,03</b>		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Pontianak</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>19.179.900,00</b>		
2	12	03	2,03	<b>03</b>	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Pontianak	2	laporan'	19.179.900,00	APBD	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH</b>	<b>Pontianak</b>		<b>%</b>	<b>206.634.020,00</b>		
						<b>Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK</b>			<b>%</b>			
						<b>Persentase penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pelayanan keliling</b>			<b>%</b>			
						<b>Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan</b>			<b>%</b>			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2	12	04	2,01		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	Pontianak	100	%	83.635.280,00		
2	12	04	2,01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pontianak	2	dokumen	83.635.280,00	APBD	
2	12	04	2,03		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Pontianak	100	%	122.998.740,00		
2	12	04	2,03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pontianak	4	laporan	81.404.940,00	APBD	
2	12	04	2,03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Pontianak	2	laporan	41.593.800,00	APBD	
2	12	5			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Penyusunan Profil Kependudukan</b>	Pontianak	100	%	19.925.000,00		
2	12	5	2,01		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan</b>	Pontianak	100	%	19.925.000,00		
2	12	05	2,01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Pontianak	1	dokumen	3.000.000,00	APBD	
2	12	05	2,01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Pontianak	1	dokumen	16.925.000,00	APBD	
										<b>10.649.151.800,00</b>		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2023 merupakan suatu dokumen yang disusun dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dalam dokumen ini termuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja khususnya *outcomes* dituangkan dalam dokumen yang termuat dalam indikator sasaran. Indikator sasaran tersebut merupakan hasil (*outcomes*) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan diharapkan dapat diukur capaian kinerjanya.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik dari aspek kepastian status hukum warganya, aspek perencanaan pembangunan yang dapat memproduksi data-data statistik sebagai bahan perencanaan, maka program strategis nasional yang diantaranya sukses KTP elektronik (KTP el) tahun 2012 yang telah terlaksana dalam jangka pendek diharapkan dapat mendukung sukses Pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2023 akan melaksanakan 5 program, 16 kegiatan dan 40 sub kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penerapan KTP-el dan dokumen pencatatan sipil di Kota Pontianak yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi. Setelah dilakukan evaluasi/pengukuran terhadap kinerja, baik

kinerja kegiatan, program maupun kebijakan, diharapkan menjelang akhir Tahun Anggaran 2023 telah mencapai sasaran kinerja kegiatan sebagaimana yang direncanakan. Adapun keberhasilan terhadap capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Meningkatnya tertib administrasi Aparat petugas pelaksana pelayanan sesuai standart nasional; kependudukan, pendokumentasian akta catatan sipil serta tersedianya Data Base Kependudukan;
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik berbagai pihak untuk penyempurnaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ini dapat mejadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Pontianak

**ERMA SURYANI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671101 199803 2 004 1 010